

SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ATAS PENGGUNAAN TIMBANGAN YANG TIDAK SESUAI STANDAR (STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2015)



WAHYUDI

B111 12 102

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2016

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
ATAS PENGGUNAAN TIMBANGAN YANG TIDAK SESUAI STANDAR
(STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2015)**

OLEH:

**WAHYUDI
B111 12102**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana
Dalam Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ATAS PENGGUNAAN TIMBANGAN YANG TIDAK SESUAI STANDAR (STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2015)


Disusun dan diajukan oleh:

WAHYUDI
NIM B111 12 102

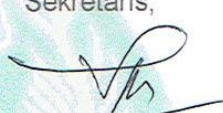
Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Jum'at, 04 Maret 2016 dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua,


Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H, M.H
NIP. 1962 0105 1986 011 001

Sekretaris,


Dr. Hj. Haeranah, S.H., M.H
NIP. 1966 1212 1991 032 002

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : WAHYUDI

No. Pokok : B111 12 102

Program : ILMU HUKUM

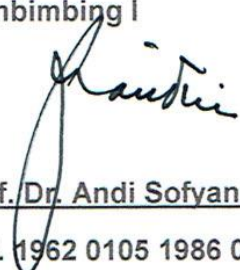
Bagian : HUKUM PIDANA

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana
Penipuan Atas Penggunaan Timbangan yang
Tidak Sesuai Standar (Studi Kasus Di Kota
Makassar Tahun 2015)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar ujian skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Januari 2016

Pembimbing I


Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H, M.H

NIP. 1962 0105 1986 011 001

Pembimbing II


Dr. Hj. Haeranah, S.H, M.H

NIP. 1966 1212 1991 032 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **WAHYUDI**
No. Pokok : B111 12 102
B a g i a n : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Penipuan (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2015 Penipuan Oleh Pedagang Dengan Menggunakan Timbangan Tang Yang Tidak Sesuai Standard di Kota Makassar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2016

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

WAHYUDI (B111 12 102), "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Atas Penggunaan Timbangan yang Tidak Sesuai Standar (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2015)*". di bawah bimbingan Bapak Andi Sofyan sebagai pembimbing I dan Ibu Hj. Haeranah sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penipuan dengan menggunakan timbangan yang tidak sesuai standar di kota makassar, serta untuk mengetahui upaya-upaya pihak berwenang dalam menangani penipuan dengan menggunakan timbangan yang tidak sesuai standar di kota makassar.

Data yang diperoleh dari hasil kuisioner dan wawancara pihak terkait yang telah dibagikan kemudian dianalisis dengan membandingkan keadaan nyata dan data yang ada tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan timbangan yang tidak sesuai standar di Kota Makassar serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta tersebut, maka penulis menyimpulkan antara lain : faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan penipuan timbangan buah yang tidak sesuai standar yakni faktor ekonomi, lingkungan, sosial budaya, mudahnya melakukan kejahatan penipuan, dan minimnya resiko tertangkap oleh pihak berwajib. Upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak kejahatan penipuan timbangan yang tidak sesuai standar terbagi atas dua yaitu upaya langsung dan upaya tidak langsung. Upaya langsung yaitu dengan melakukan Pengecekan Secara Berkala dan Secara Langsung oleh Pihak UPTD yang dilakukan secara Langsung, Penyitaan, Reparasi Timbangan Yang telah Diubah, Perubahan Satuan Timbangan yang merupakan Produk Dari Luar Negeri, Pemasangan Segel Yang Resmi. Upaya tidak langsung yaitu dengan cara Pengecekan Secara Berkala dan Secara Langsung yang dilakukan Di Badan Metrologi Legal, Pendaftaran Membuka usaha dengan menggunakan timbangan, Pembuatan Surat Izin Penggunaan Timbangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, tak lupa pula salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para Sahabatnya dan suri tauladannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Atas Penggunaan Timbangan yang Tidak Sesuai Standar (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2015)”**.

Skripsi ini dilanjutkan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam bagian Hukum Pidana program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan rasa hormat, cinta, kasih sayang penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tuaku Ayahanda Hj.Darwis dan Ibundaku Hj.Rabasia , sembah sujud ananda pada ayah dan bunda semoga skripsi ini menjadi awal pembuka jalan kesuksesan dan pembawa kebahagiaan buat ayah dan ibu. Kepadakakak, kakek, nenek, tante, om, saudara sepupuku yang berlimpah kasih sayangnya, keluarga besar dan kepada semua orang yang selalu menyayangi penulis memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwie Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. FaridahPatittingi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. AhmadiMiru, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. SyamsuddinMukhtar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. HamzahHalim, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan,S.H.,M.H selaku pembimbing I dan Dr. Hj. Haeranah, S.H.,M.H, selaku pembimbing II yang telah membantu dan meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si, Bapak Dr.Amir Ilyas, S.H.,M.H dan Ibu Hijrah Adhyanti Mirzana,S.H.,M.H selaku dosen penguji.
6. Seluruh Dosen pengajar di fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak berjasa mendidik penulis sehingga berhasil menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Staf Pengurus Akademik beserta jajarannya terkhusus untuk Bapak Bunga, BapakUsman, danIbu Sri selaku Staf Akademik yang tak kenal lelah membantu penulis selama kuliah.

8. Kepala balai Metrologi Legal kota Makassar serta jajarannya yang telah memberikan bantuan, meluangkan waktunya dan kerja samanya selama penulis melakukan penelitian.
9. Teman-teman anggota KKN Jaja, Ani, Asmi, Bismi, Edith Darma, Kab. Bulukumba, Kec. Ujung Bulu, Kel. Bintarore.
10. Sahabat-sahabatku Amri, Fathul, Dina, Marissa, Iswan, Uni, Bia, dan semuanya yang namanya tidak bisa penulis sisipkan satu-satu.
11. Sahabat-sahabat KNR Makassar dan Gundam Makassar.
12. Teman-teman seperjuangan Angkatan "PETITUM 2012".
13. Gengbureng terima kasih tak terhingga atas segalanya di hari kemarin, sekarang dan yang akan datang, semoga Allah SWT selalu senang memberikan keberuntungan untuk kalian.

Penulis percaya bahwa Allah SWT selalu memudahkan orang yang gemar memudahkan, Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sangat mengharapkan kritis dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis kiranya skripsi ini akan bermanfaat bagi pembacanya. Amin.

Makassar, Januari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kriminologi	6
1. Pengertian Kriminologi	6
2. Ruang Lingkup kriminologi	10
B. Kejahatan	12
C. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan	18
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan	23
1. Upaya Preventif	26
2. Upaya Represif	28
E. Penipuan	31

1. Pengertian Kejahatan Penipuan.....	31
2. Unsur-Unsur Kejahatan Penipuan.....	34
F. Timbangan	39
1. Pengertian Timbangan.....	39
2. Macam-Macam Timbangan.....	39
3. Syarat-Syarat Timbangan Yang Sesuai Standar.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Lokasi Penelitian	42
B. Jenis Dan Sumber Data	42
C. Populasi dan Sampel	43
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Faktor Penyebab Terjadinya Penipuan Dengan Menggunakan Timbangan yang Tidak Sesuai Standar	46
B. Upaya yang Dilakukan oleh Pihak Berwenang Dalam Menangani Penipuan Dalam Menggunakan Timbangan yang Tidak Sesuai Standar.....	53
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel

Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Dengan Menggunakan Kuisoner	48
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtstats*), bukan negara yang berdasar kekuasaan belaka (*machtstats*). Oleh karena itu tata kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus disusun dalam bingkai hukum. Konsepsi Negara Hukum atau *rechtstats* tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai Negara Hukum, Negara Indonesia memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya. Negara memberikan suatu hukuman apabila warga negaranya melakukan pelanggaran terhadap hukum atau melakukan kejahatan,¹ menurut Achmad Ali, hukum adalah:

“Seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kehidupannya. Apabila kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal”.

¹ Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia hal 11.

Hukum yang menjadi landasan utama masyarakat dalam mengatur setiap kondisi di lingkungan sosial dimana banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik itu pelanggaran secara publik maupun secara individu dimana akan akan merugikan setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana penipuan. Hal ini disebabkan karena tindak penipuan tidaklah sulit dalam melakukannya, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong atau fiktif, menjanjikan atau memberikan iming-iming dalam bentuk apapun, baik terhadap sesuatu yang dapat memberikan kekuatan (*magis*) maupun pada harta kekayaan.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana ini diatur dalam Bab XXV dan terbentang antara Pasal 378 sampai dengan Pasal 395, di dalam KUHP peraturan mengenai tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang paling panjang pembahasannya diantara kejahatan terhadap harta benda lainnya.

Dengan semakin canggih dan moderennya teknologi, berkembang pula modus-modus baru penipuan di masyarakat yang sebagian orang tidak mengetahui misalnya saja pada penipuan timbangan yang

digunakan oleh pedagang buah. Jenis penipuan ini sudah marak dilakukan di masyarakat karena tuntutan ekonomi masyarakat yang semakin tinggi saat ini menyebabkan masyarakat melakukan berbagai cara meski dengan melakukan tindak pidana penipuan.

Salah satu kasus penipuan yang diberitakan media koran Tribun Lampung, dimana modus penipuan yang dilakukan oleh pedagang dengan cara mengatur timbangan sebelum melakukan penjualan, jadi jumlah barang yang ditimbang pada penimbangan barang itu tidak sesuai dari jumlah timbangan normalnya. Secara langsung melihat unsur-unsur dari kejahatan pedagang ini bisa kita lihat bahwa iya melakukan kejahatan penipuan.²

Melihat maraknya kejahatan penipuan pengaturan timbangan oleh pedagang, hal ini melatar belakangi penulis mengambil judul mengenai “**Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Atas Penggunaan Timbangan yang Tidak Sesuai Standar (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2015)**”. Penipuan timbangan pada penjualan buah sangat marak dilakukan, dan sudah menjadi kejahatan yang sudah sering dilakukan oleh pedagang-pedagang buah nakal di jalanan.

² <http://lampung.tribunnews.com/2014/02/24/begini-modus-pedagang-mengurangi-bobot-barang> Di akses pada tanggal 11/10/2015,pukul 20:38.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menyebabkan penipuan dengan menggunakan timbangan buah di pinggir jalan kota makassar ?
2. Bagaimanakah upaya pihak berwenang dalam menangani penipuan dengan menggunakan timbangan buah di pinggir jalan kota makassar ?

C. Tujuan Pelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penipuan timbangan buah di pinggir jalan kota makassar.
2. Untuk mengetahui upaya pihak berwenang dalam menangani penipuan timbangan buah di pinggir jalan kota makassar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai aplikasi ilmiah untuk mengetahui serta membuktikan teori-teori yang berkenaan dengan penulisan ini.
2. Sebagai satu studi yang diharapkan dapat menjadikan bahan rujukan atau referensi bagi yang ingin melakukan penelitian yang relefan dengan materi dan skripsi ini, serta pihak lain yang

memiliki perhatian terhadap isu-isu mengenai kejahatan
penipuan timbangan buah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologis perancis, secara harafiah berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.³

Beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda mengenai kriminologi ini. Di antaranya adalah:

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger membagi Kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:⁴

1. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari ilmu alam.

³Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 9.

⁴ *Ibid*, hlm. 10

2. Sosiologis kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan (etiologi sosial).
3. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari aspek psikologis. Penelitian tentang aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan antara lain ditujukan pada aspek kepribadiannya.
4. Psipatologi kriminal dan *neuropatologi* kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang sakit jiwa atau sakit sarafnya, atau lebih dikenal dengan istilah psikiatri.
5. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh berkembangnya penghukuman, arti penghukuman, dan manfaat penghukuman. Di samping itu terdapat kriminologi terapan berupa:
 - a. *Hygiene* kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
 - b. Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi.
 - c. Kriminalistik (*police scientific*), yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Bonger, dalam analisisnya terhadap masalah kejahatan, lebih mempergunakan pendekatan sosiologis, misalnya analisa tentang hubungan antara kejahatan dengan kemiskinan.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a sosial phenomenon*). Menurut sutherland, kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:⁵

1. Sosiologi hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

2. *Etiologi* kejahatan.

Merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.

3. *Penology*

Pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif.

⁵ *Ibid*, hlm. 11

Paul moedigdo moeliono memberikan defenisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Paul moedigdo moeliono tidak sependapat dengan defenisi yang diberikan sutherland. Menurutnya defenisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, oleh karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat tersebut.⁶

Wolfgang, Savits dan jonhston dalam *the Sociology of crime and Delinquency* memberikan defenisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi obyek studi kriminologi melingkupi:⁷

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan.
- b. Pelaku kejahatan.
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

⁶ Soedjono, 1976, Penanggulangan Kejahtan, Bandung, ALUMNI, hlm 24

⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *op.cit*, hlm.12

Ketiganya tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat kejahatan.

J.Contstant memberikan defenisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musababnya terjadinya kejahatan atau penjahat.⁸

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Objek kajian kriminologi secara umum yaitu:kejahatan,yaitu perbuatan yang memiliki kreteria suatu perbuatan yang dinamakan kejahatan tentunya dipelajari dari peraturan perundang-undangan memuat perbuatan pidana.⁹

a) Penjahat

Yaitu orang yang melakukan kejahatan. Studi terhadap pelaku atau penjahat ini terutama dilakukan oleh aliran kriminologi positif dengan tujuan mencari sebab-sebab orang yang melakukan kejahatan. Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positif menyadarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan orang yang bukan penjahat, dan perbedaan itu ada pada aspek biologik,psikologis,maupun susiokultural.

b) Reaksi Masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat.

⁸ A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, Pustaka Refleksi Books, hlm. 2

⁹ B. Bosu, 1982, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm 103.

Studi mengenai masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi undang-undang belum mengaturnya.

kriminologi mencakup tiga hal pokok yakni:¹⁰

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making law*).
2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), dan
3. Reaksi terhadap pelanggar hukum (*reacting toward the breaking of law*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditunjukkan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap *calon* pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Yang di bahas dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) adalah:

- a. Defenisi kejahatan
- b. Unsur-unsur kejahatan
- c. Revativitas pengertian kejahatan
- d. Penggolongan kejahatan

¹⁰ A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, Pustaka Reflksi, hlm. 2

e. Statistik kejahatan

Yang di bahas dalam etilologi Kriminal (*breaking laws*) adalah:

- a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminal,
- b. Teori-teori kriminal, dan
- c. Berbagai perspektif kriminologi

Yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*) antara lain:

- a. Teori penghukuman
- b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitative.

B. Kejahatan

Kejahatan menurut kamus Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana).

Kitab undang-undang hukum pidana, tidak ada satu definisi pun tentang kejahatan. Dalam buku II kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya memberikan perumusan perbuatan manakah yang dianggap sebagai suatu kejahatan. Misalnya pasal 338 KUHP :”barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.

R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan/tingkah laku yang bertentangan dengan kejahatan undang-undang. Sedangkan ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan artinya perbuatan atau tingkah-laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.¹¹

Menurut Bonger tentang kejahatan adalah

“Kejahtan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) merupakan suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti defenisi-defenisi yang formil umumnya. Ditinjau dari dalam sampai intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan”.¹²

Kejahatan bukanlah fenomena alamiah, melainkan fenomena sosial dan historis, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan, disana harus ada masyarakat yang normanya, aturannya dan hukumnya dilanggar, disamping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarnya. Gejala yang dirasakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian dalam masyarakat

¹¹ B. Bosu, *op.cit*, hlm. 19

¹² J.E Sahetapy, dan Reksodiputro, 1982, *Parados Dalam Kriminologi*, Jakarta, CV. Rajawali, hlm. 21.

yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan.

Tiga perspektif Teori Kejahatan yaitu:¹³

1. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Biologis

- a. Cesare Lombroso (1835-1909)

Kriminologi beralih secara permanen dari filosofi abstrak tentang penanggulangan kejahatan melalui legislasi menuju suatu studi modern penyidikan mengenai sebab-sebab kejahatan. Ajaran Lombroso mengenai kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan nonkriminal. Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dan evolusi.

Teori Lombroso tentang *born criminal* (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa “para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendakati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat”. Mereka dapat dibedakan dari non-kriminal melalui beberapa *atavistic stigmata* ciri-ciri fisik dari makhluk pada tahap awal perkembangan, sebelum manusia mereka benar-benar menjadi manusia.

Lombroso beralasan bahwa seringkali para penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat, suatu sifat yang pada umumnya

¹³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *op.cit*, hlm. 35

dimiliki makhluk *carnivora* yang merobek dan melahap daging mentah. Jangkauan/rentang lengan bawah dari para penjahat sering lebih besar dibanding tinggi mereka, sebagaimana dimiliki kera yang menggunakan tangan mereka untuk menggerakkan tubuh mereka diatas tanah.¹⁴

b. Enrico Ferri (1856-1929)

Ferri berpendapat bahwa “kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif di antara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperatur), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikologis)”.

Ferri juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan sosial, misalnya subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi dan sebagainya.

c. Raffaele Garofalo (1852-1934)

Garofalo menelusuri akar tingkah laku kejahatan bukan kepada bentuk-bentuk fisik, tetapi kepada kesamaan psikologi yang dia sebut sebagai moral anomalies (keganjilan-keganjilan moral). Menurut teori ini, kejahatan-kejahatan alamiah (*natural crimes*) ditemukan dalam seluruh masyarakat manusia, tidak peduli pandangan pembuat hukum, dan tidak ada masyarakat yang beradab dapat mengabaikannya. Kajahatan

¹⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *op.cit.* hlm. 37

demikian, mengganggu sentimen-sentimen moral dasar dari probity/kejujuran (menghargai hak milik orang lain).

d. Charles Buchman Goring (1870-1919)

Goring menyimpulkan bahwa “tidak ada perbedaan-perbedaan signifikan antara para penjahat dengan non penjahat kecuali dalam hal tinggi dan berat tubuh. “para penjahat didapati lebih kecil dan ramping. Goring menafsirkan temuannya ini sebagai penegasan dari hipotesanya, bahwa para penjahat secara biologis lebih interior, tetapi dia tidak menemukan satupun tipe fisik penjahat.¹⁵

2. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari prespektif psikologis

a. Samuel Yochelson dan Stanton Samenow

Yochelson dan Samenow mengidentifikasi sebanyak 52 pola berpikir yang umumnya ada pada penjahat yang mereka teliti. Kedua berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang marah, yang merasa suatu sense superioritas, menyangka tidak bertanggungjawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap dia merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan.

b. Teori Psikoanalisa, Sigmund Freud (1856-1939)

Teori psikoanalisa dan sigmund freud, ada tiga prinsip dikalangan psikologis yang mempelajari kejahatan yaitu:

¹⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *op.cit.* hlm. 37

- a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka,
 - b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kesalahan,
 - c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.
3. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari prespektif Sosiologi teori Sosiologi ini berbeda dengan teori-teori prespektif Biologis dan Psikologis, teori sosiologis ini mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial, yang menekankan pada perspektif strain dan penyimpangan budaya.

a. Emile Durkheim

Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju satu masyarakat yang modern dan kota makin kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-norma umum, tindakan-tindakan dan harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain.

b. Robert K. Merton

Menurut Merton di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara

merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan dapat timbul karena adanya dua macam faktor Yaitu:¹⁶

1. Faktor pembawaan

Yaitu bahwa seorang menjadi penjahat karena pembawaan atau bakat alamiah, maupun karena kegemaran atau hobi. Kejahatan karena pembawaan itu timbul sejak anak itu dilahirkan ke dunia seperti : keturunan/anak-anak yang berasal dari keturunan/orang tuanya adalah penjahat minimal akan diwariskan oleh perbuatan orang tuanya, sebab buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pertumbuhan fisik dan meningkatnya usia ikut pula menentukan tingkat kejahatan. Dalam teori ilmu pendidikan dikatakan bahwa ketika seorang anak masih kanak-kanak, maka pada umumnya mereka suka melakukan kejahatan perkelahian atau permusuhan kecil-kecilan akibat perbuatan permainan seperti kelereng/nekeran. Ketika anak menjadi akil balik (kurang lebih umur 17 sampai 21 tahun), maka kejahatan yang dilakukannya adalah perbuatan seks seperti perzinahan, dan pemerkosaan. Antara umur 21 sampai dengan 30 tahun, biasanya mereka melakukan kejahatan dibidang ekonomi. Sedangkan antara umur 30 sampai 50 dimana manusia telah memegang posisi kehidupan yang mantap, maka mereka sering melakukan kejahatan penggelapan, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya.

¹⁶ B.Bosu, *op.cit*, hlm. 24.

2. Faktor lingkungan

Socrates “mengatakan bahwa manusia masih melakukan kejahatan karena pengetahuan tentang kebijakan tidak nyata begininya”. Socrates menunjukkan bahwa pendidikan yang dilaksanakan di rumah maupun di sekolah memegang peranan yang sangat penting untuk menentukan kepribadian seseorang. Oleh karena itu menciptakan lingkungan yang harmonis adalah merupakan kewajiban bagi setiap orang, masyarakat maupun negara.¹⁷

Menurut membagi teori-teori penyebab kejahatan ke dalam 5 bagian, yaitu:¹⁸

1. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association*)

Teori asosiasi diferensial dikemukakan pertama kali oleh seorang ahli sosiologi Amerika, E.H.Sutherland, pada tahun 1934 dalam bukunya *principle Of Criminology*. Sutherland menemukan istilah *differential association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku criminal melalui interaksi sosial itu. Menurutnya mungkin saja melakukan kontrak (hubungan) dengan “*definition favorable to violation of law*” atau dengan “*defenition unfarotble to vialation of law*”. Rasio dan defenisi atau pandangan tentang kejahatan ini apakah pengaruh-pengaruh kriminal atau non-kriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang menentukan ia menganut tindak kejahatan sebagai satu jalan hidup yang diterima.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 24

¹⁸ H. Romli Admasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung, PT. Eresco, hl 23-26.

2. Teori Anomi

Menurut Marton, di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas kesempatan untuk menjadi yang teratas tidak perlu dibagikan secara merata, sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Teori anomie dari Marton menekankan pentingnya dua unsur, yaitu:

- a. *Cultural aspiration* atau *culture goals* yang diyakini berharga untuk diperjuangkan, dan
- b. *Institutionalized means* atau *accepted ways* untuk mencapai tujuan itu. Jika suatu masyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegrasi, dengan kata lain sarana harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka. Berdasarkan perspektif di atas, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan (karena itu kadang-kadang pendekatan ini disebut *a structural explanation*). Selain teori ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi di bawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan, disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi.

3. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol merujuk pada setiap perspektif yang membahas perihal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis: antara lain

struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan semikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.

Pemunculan teori kontrol-sosial ini diakibatkan tiga ragam perkembangan dan kriminologi. Ketiga ragam perkembangan itu adalah:

- a. Adanya reaksi terhadap orientasi lebeling dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai kriminologi baru dan hendak kembali kepada subjek semula, yaitu: penjahat.
- b. Munculnya studi tentang criminal justice sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem.
- c. Teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja.

4. Teori Labeling

Teori ini memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan teori-teori yang lain melakukan pendekatan dari sudut statistik, patologis atau pandangan yang bersifat relatif, Backer beranggapan bahwa pendekatan-pendekatan dimaksud tidak adil dan kurang realistis. Teori Labeling dari Edwin Lemert mengelaborasi pendapat Tannenbaum dengan menformalisasi asumsi-asumsi dasar dari Labeling Theory. Lemert membedakan dua jenis tindakan menyimpang: penyimpangan

primer (*primer deviations*) dan penyimpanan sekunder (*secondary deviations*).

Menurut Schrag menyimpulkan teori Labeling sebagai berikut:¹⁹

- a. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal.
- b. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan.
- c. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang, melainkan karena ia ditetapkan demikian oleh penguasa.
- d. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian : kelompok criminal dan non criminal.
- e. Tindakan penangkapan adalah awal dari proses Labeling.
- f. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku/penjahat sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya.
- g. Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan utama.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 50-21

- h. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenakan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat.
- i. Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai deviant dan subkultur.

5. Teori Paradigma Studi Kejahatan

Simeca dan lee dikutip dari Robert F. Meier, mengetengahkan tiga perspektif tentang hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan di satu pihak dan tiga paradigma tentang studi kejahatan. Perspektif dimaksud adalah *consensus*, *pluralist*, dan *perspective conflict*. Prinsip-prinsip yang dianut oleh *perspektif consensus* ini memiliki dampak terhadap paradigma positif dari studi kejahatan. Sebagai suatu paradigma studi kejahatan, positif menekankan pada determinisme dimana tingkah laku seseorang adalah disebabkan oleh hasil hubungan erat sebab-akibat antara individu yang bersangkutan dengan lingkungannya. Bahwa tiap orang yang memiliki pengalaman yang sama cenderung untuk bertingkah laku sama sehingga sejak dini kita dapat memprediksi tingkah laku manusia.²⁰

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil

²⁰ *Ibid*, hlm, 53

terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi permasalahan tertentu.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan / upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan / upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.²¹

Lain halnya menurut Baharuddin Lopa bahwa upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).²²

Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa meliputi:

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan

²¹Barda Nawawi Arif. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam

Penanggulangan Kejahatan, Kencana. (Jakarta 2001), hlm 77.

²² Baharuddin Lopa & Moch Yamin. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana (Bandung 2001), hlm16.

- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat
- d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
- e. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.²³

Seperti yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland dan Cressey yang mengemukakan bahwa dalam crime prevention dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu:²⁴

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan

Yakni suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

1. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali (*the first crime*)

Yakni satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode preventif (prevention).

²³ Ibid hlm 16-17

²⁴ Romli Atmasasmita. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. PT. Eresco, (Bandung 1992), hlm 66.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di lembaga pemasyarakatan.

Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

1. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali.

Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang.

Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yakni:

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial

dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.

- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.²⁵

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas tampak bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sementara faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Jadi dalam upaya preventif itu adalah melakukan suatu usaha yang positif, serta menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang, selain itu dilakukan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

²⁵ *Ibid hlm 79*

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia, yang didalamnya terdapat lima sub sistem yaitu sub sistem kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan dan kepengacaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.²⁶

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut:

²⁶ Abdul Syani. Sosiologi Kriminologi. Pustaka Refleksi. (Makassar, 1987) hlm 137.

a. Perlakuan (*treatment*)

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yakni:²⁷

- a. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang-orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- b. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan

²⁷ Ibid hlm 139

kesalahannya, dan dapat kembali bergaul dalam masyarakat seperti sedia kala.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi di kemudian hari.

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (treatment), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.²⁸

Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan, hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin, bukan pembalasan dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Merujuk pada Undang-Undang No.2 tentang Metrologi Legal pasal 32 dengan ketentuan pidananya menurut pasal 32:

²⁸ A. S. Alam, Pengantar Kriminologi (Makassar 2010), hlm. 80.

- (1) barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam pasal 25, pasal 26, pasal 27, dan pasal 28 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam pasal 30 dan pasal 31 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 6 (Enam) bulan dan atau denda setinggi tingginya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) pelanggaran dalam terhadap perbuatan yang tercantum sdalam pasal 22, pasal 23 dan pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) undang-undang ini dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi tingginya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

E. Penipuan

1. Pengertian Kejahatan Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan

bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seorang dari jabatannya.

Di dalam KUHP tepatnya pada pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichting*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Dalam Pasal 378 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan pasal 378 KUHP di atas, maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud

menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar.

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul dan terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

2. Unsur-unsur Kejahatan Penipuan

Menurut ahli hukum pidana Andi Zainal Abidin Farid, bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam pasal 378 tersebut yaitu:

1. Membujuk (menggerakkan hati) orang lain
2. Menyerahkan (afgifte) suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang
3. Dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara:
 - a. Memakai nama palsu
 - b. Memakai kedudukan palsu
 - c. Memakai tipu muslihat
 - d. Memakai rangkaian kata-kata bohong
4. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Sedangkan Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut adalah sebagai berikut:²⁹

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.

²⁹ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, hlm. 70

2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - b. Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

Lebih lanjut Moejatno menyebutkan bahwa sebagai akal penipuan dalam Pasal 378 KUHP adalah:

1. Menggunakan akal palsu

Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan itu tampak kecil, misalnya orang yang sebenarnya Ancis, padahal yang sebenarnya adalah orang lain, yang hendak menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada orang yang bernama Ancis orang akan percaya untuk memberikan suatu barang. Supaya ia mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan namanya dari Anci menjadi Ancis. Akan tetapi kalau si penipu itu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka ia tidak dikatakan menggunakan nama palsu tetapi ia tetap dipersalahkan.

2. Menggunakan kedudukan palsu

Seseorang yang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu: X menggunakan kedudukan sebagai pengusaha dari perusahaan P, padahal ia sudah diberhentikan, kemudian mendatangi sebuah toko untuk dipesan kepada toko tersebut, dengan mengatakan bahwa ia X disuruh oleh majikannya untuk mengambil barang-barang itu. Jika toko itu menyerahkan barang-barang itu kepada X yang dikenal sebagai kuasa dari perusahaan P, sedangkan toko itu tidak mengetahui, bahwa X dapat dipersalahkan setelah menipu toko itu dengan menggunakan kedudukan palsu.

3. Menggunakan tipu muslihat

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati.

4. Menggunakan susunan belit dusta

Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan tidak mudah ditemukan di mana-mana. Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai

kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

Unsur-unsur tindak pidana penipuan juga dikemukakan oleh Tongat sebagai berikut:³⁰

1. Unsur menggerakkan orang lain

Unsur ini ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.

2. Unsur menyerahkan suatu benda

Menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal

³⁰ *Ibid*, hlm. 72.

ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu.

Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu:

1. Unsur memakai nama palsu

Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi.

2. Unsur memakai martabat palsu

Dengan martabat palsu dimaksudkan menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.

3. Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan

Unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain.

Sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.

Berdasarkan semua pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut da dalam pasal tersebut telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

F. Timbangan

1. Pengertian timbangan

Timbangan adalah alat yang dipakai melakukan pengukuran massa suatu benda.

2. Macam-macam timbangan

- a. Timbangan badan: yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan.
- b. Timbangan digital: Yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik.
- c. Timbangan manual: yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas dan menggunakan indikator jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.
- d. Timbangan *Hybrit*: yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan antara timbangan manual dan digital.³¹

³¹ <http://ayusaputri46.blogspot.co.id/2013/09/macam-macamtimbangan.htm>, Diakses pada tanggal 11/10/15, pukul 20:35

3. Syarat Timbangan yang Sesuai Standar

Syarat timbangan yang sesuai standar yang digunakan dalam keperluan baik itu secara umum maupun dalam hal perdagangan dikelola oleh lembaga yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang mengatur masalah Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP). Seperti yang diberitakan oleh Malang Post pada tanggal 29 Maret 2015, dimana UPTD merupakan lembaga yang melindungi konsumen dan masyarakat, supaya masyarakat mendapatkan barang sesuai dengan takaran yang adil, tidak hanya konsumen yang dilindungi, tera ulang timbangan juga melindungi para pedagang akibat ketidak tepatan alat ukur takar timbang dan perlengkapan (UTTP) yang bisa berdampak pada kerugian. UPTD juga memiliki tujuan memberikan kepastian hukum, melindungi konsumen sekaligus melatih kejujuran dari para pedagang dalam bertransaksi maupun jual beli.³²

Aturan mengenai syarat timbangan yang sesuai standar diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yaitu : terdapat pada pasal 12 yang mengatur tentang syarat-syarat timbangan yang sesuai standar menurut badan Metrologi:

- a. Alat ukur harus punya tanda pabrik yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- b. Alat UTTP dari luar harus ada ijin tipe, harus diuji sifat-sifatnya, konstruksi, dan bahannya.
- c. Sebelum alat ukur dilakukan harus ditera ulang³³ ketetapan dan kepekaannya.

³² <http://www.malang-post.com/malang-rama/99800-tera-ulang-ciptakan-pasar-tertib-ukur>, diakses pada tanggal 20/10/15, pukul 23:32

³³ Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang METROLOGI LEGAL Pasal 1 huruf (r). tera ulang ialah hal menandai berkaladengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau

- d. Tanda sah nya memakai tanda tera sah yang berlaku.
- e. Harus diuji sekali setahun.

Adapun syarat tera yang sah dalam melakukan tera ulang menurut badan metrologi:

- a. Alat ukur yang sudah digunakan, dilakukan pengecekan dengan cara pedagang yang bersangkutan membawa langsung alat ukurnya ke badan metrologi.
- b. Apabila cara pengecekan seperti diatas (point a) maka pihak dari badan metrologi yang melakukan pengecekan langsung dilapangan.
- c. Bila alat ukur tersebut tidak dapat dipindahkan maka pihak dari badan metrologi akan melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi dimana alat ukur tersebut berada.

tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa, dan memahami keadaan lingkungan di tempat laksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi:

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sepanjang Jl. Perintis Kemerdekaan, Jl. Lancak Lama dan Jl. Mappanyuki. Pemilihan lokasi ini didasari alasan karena daerah tersebut merupakan daerah yang memiliki tempat penjualan buah di pinggir jalan.

B. Jenis Dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh penulis dari 2 (dua) jenis yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan kuisioner dengan pihak aparat metrologi yang berhubungan dengan penelitian ini dan sehubungan dengan penelitian ini dan lingkungan masyarakat sekitaran lokasi penelitian yang berada di area sekitar sepanjang Jl. Perintis Kemerdekaan, Jl. Lancak Lama dan Jl. Mappanyuki.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan yaitu penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu dimana dengan membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan objek yang dimaksud sesuai dengan judul skripsi ini kemudian membandingkan antara satu dengan yang lain dan dari hasil perbandingan itulah ditarik kesimpulan sebagai bahan kajian.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang buah di sepanjang Jl. Perintis Kemerdekaan, Jl. Landak Lama dan Jl. Mappanyuki dan seluruh lapisan masyarakat yang terdapat di sekitaran lokasi penelitian.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengambil subjek dan objek disarankan pada tujuan tertentu.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengadakan penelitian dalam rangka memperoleh data, maka diperlukan suatu metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian sehingga penulis memiliki metode yang jelas mengenai mekanisme perolehan data atau jawaban yang diperlukan. Dengan demikian, untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis

menggunakan metode kepustakaan (Library research) dan metode penelitian lapangan (field research) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan (library research), merupakan penyelidikan melalui buku-buku kepustakaan dan berbagai sumber bacaan dengan mengkaji teori-teori yang ada dalam literatur hukum pidana dan kriminologi.
2. Penelitian lapangan (field research), merupakan penelitian yang mengharuskan penulis untuk turun langsung ke lapangan atau objek penelitian guna memperoleh data-data yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh penjual buah.

Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan tiga metode yaitu:

Metode interview, observasi, Dengan menggunakan dua metode tersebut, diharapkan penulis dapat memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk memberikan penjelasan terhadap kedua metode pengumpulan data tersebut, berikut ini akan dibahas secara singkat sebagai berikut:

1. Metode Interview

Metode Interview merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Adapun interview ini dimaksudkan untuk pengumpulan data berbentuk wawancara berupa tanya jawab secara lisan (interview) antara peneliti dengan beberapa narasumber (informan) yang dikerjakan secara sistematis

berdasarkan pada tujuan penelitian. Interview ini ditujukan pada para pejabat yang berwenang dalam hal yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Metode Observasi

Metode observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui pengamatan terhadap gejala objek yang diteliti. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan melaksanakan observasi dengan maksud agar dapat mendekati dan mengetahui permasalahan yang sebenarnya kepada objek atau sasaran.

E. Teknik Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data primer dan data sekunder seperti tersebut diatas, maka untuk menyelesaikan sebuah karya tulis (skripsi) yang terpadu dan sistematis, maka digunakan suatu sistem analisis data yaitu analisis kualitatif dan deskriptif, yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai tindak pidana dilakukan oleh penjual buah. Hasil wawancara dan studi kepustakaan tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab terjadinya penipuan dengan menggunakan timbangan yang tidak sesuai standar.

Makassar merupakan salah satu kota besar yang tingkat kejahatannya cukup tinggi, kejahatan yang dilakukan tak sekedar seperti tindak pidana konvensional sebagaimana yang diatur dalam kodifikasi, melainkan telah menggunakan cara atau modus yang beragam.

Tindak kejahatan khususnya penipuan dengan menggunakan timbangan atau alat ukur berat suatu benda sudah menjadi tindak kriminal yang banyak dilakukan kota Makassar yang sering dilakukan dikalangan para pedagang buah untuk mengelabui pembeli barang dagangan mereka.

Sebelum menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, penulis akan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara di Kantor Dinas Badan Metrologi Legal Kota Makassar dan hasil dari pembagian kuisioner pada pedagang di tiga titik kota Makassar yang merupakan lokasi yang banyak dijadikan sebagai lokasi perdagangan buah oleh pedagang yaitu sepanjang Jl. Perintis Kemerdekaan, Jl. Landak Lama dan Jl. Mappanyuki. Adapun hasil yang didapatkan yaitu :

1. Pembagian Kuisisioner

Pembagian kuisisioner diharapkan dapat memberikan keterangan faktor apa yang melatar belakangi pedagang melakukan kejahatan penipuan terhadap penjualan buah tidak dengan menggunakan timbangan yang sesuai dengan standar. Dalam penelitian ini penulis membagikan kepada sebagian pedagang yang berada di sepanjang Jl. Perintis Kemerdekaan, Jl. Landak Lama dan Jl. Mappanyuki, dimana jumlah pedagang yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu di Jl. Perintis Kemerdekaan sejumlah 9 , Jl. Landak Lama sejumlah 4, dan di Jl. Mappayukki sejumlah 4. Dalam kuisisioner ini penulis memiliki 10 pertanyaan dimana pertanyaan seputar hal-hal pribadi dari pedagang dan hal-hal yang menjadi faktor utama pedagang melakukan penipuan.

Melihat hasil yang telah didapatkan oleh penulis melalui kuisisioner yang dibagikan kepada para pedagang di lokasi penelitian secara garis besar yang menjadi latar belakang pedagang melakukan penipuan yaitu karena adanya tuntutan Ekonomi, dimana dengan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan bahan pokok yang jadi latar belakang pedagang melakukan penipuan ini, dan juga kurangnya pengawasan terhadap pedagang yang melakukan penipuan timbangan ini. Menurut salah satu hasil kuisisioner bahwa maraknya penipuan ini karena dimana masyarakat juga tidak turut serta melakukan pengawasan terhadap penipuan ini, masyarakat yang dirasa dirugikan tidak pernah melakukan penuntutan terhadap pedagang,

inilah yang melatar belakangi mengapa pedagang semakin marak melakukan penjualan dengan cara seperti ini.

1.1 Tabel Jumlah Populasi dan Sampel penelitian dengan kuisisioner

No	Lokasi Penelitian	Jumlah Populasi Pedagang	Jumlah Sampel Penelitian
1.	Jl.Perintis Kemerdekaan	9	5
2.	Jl.Landak Lama	4	2
3.	Jl. Mappayukki	4	2

Tabel 1.1 diperoleh dari data pembagian kuisisioner oleh pedagang

2. Wawancara Dengan Pihak UPTD

Menurut Pak Jamal (salah satu staf bagian hukum dinas balai Badan Metrologi legal kota makassar dalam wawancara pada hari senin, 18 januari 2016) bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan penipuan dengan modus menggunakan timbangan yang tidak sesuai standar di kota makassar antara lain:

1. Ekonomi,
2. Lingkungan,
3. Mudahnya melakukan kejahatan penipuan tersebut, dan
4. Faktor penegakan hukum.

Lebih lanjut penulis akan membahas mengenai kelima faktor diatas yang menurut pak. Jamal merupakan faktor-faktor utama terjadinya kejahatan penipuan dengan menggunakan timbangan yang tidak sesuai standar di kota makassar.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dapat dikatakan sebagai salah satu faktor terjadinya kejahatan penipuan dengan menggunakan timbangan yang tidak sesuai standar di kota makassar. Kebutuhan hidup di daerah khususnya kota makassar sangatlah kompleks dan tidak semua masyarakat/individu sanggup untuk memenuhinya, maka beberapa individu kemudian memutuskan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat.

2. Faktor Lingkungan

Selain faktor ekonomi, salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan penipuan dengan menggunakan timbangan yang tidak sesuai dengan standar di Kota Makassar adalah faktor lingkungan, dimana tidak adanya kesadaran dari masyarakat khususnya pedagang yang mendapat pengaruh dari pedagang-pedagang yang lain, dimana pedagang melihat keuntungan yang banyak didapatkan dari pedagang yang melakukan penipuan menjadi dasar yang mempengaruhi pedagang-

pedagang yang lainnya ikut marak melakukan tindak kriminal khususnya penipuan timbangan yang tidak sesuai standar.

3. Faktor mudahnya melakukan kejahatan penipuan dengan menggunakan timbangan yang tidak sesuai standar di kota makassar.

Ada pula faktor lain yang menunjang terjadinya kejahatan penipuan dengan menggunakan timbangan yang tidak sesuai standar di kota makassar yaitu mudahnya melakukan kejahatan penipuan tersebut. Hanya dengan menggunakan timbangan yang dapat dibeli secara bebas dan dapat dijadikan media penipuan dengan menggunakan timbangan yang tidak sesuai standar, dengan timbangan tersebut pelaku dapat melakukan kejahatan penipuannya.

Menurut pak jamal (wawancara yang dilakukan pada hari selasa, 19 januari 2016) adapun faktor yang menjadi dasar mudahnya kejahatan penipuan ini yaitu karena banyaknya pedagang yang tidak mendaftarkan timbangannya di Badan Metrologi Legal yang membuat tim dari Badan Metrologi Legal sulit melakukan pengecekan timbangan oleh pedagang, dan banyaknya pedagang kaki lima yang begitu saja melakukan penjualan buah di pinggir jalan baik membuka lapak secara langsung di trotoar jalan, maupun dengan menggunakan kendaraan, di mana dengan penjualan seperti ini masyarakat yang kurang paham akan kejahatan penipuan timbangan yang tidak sesuai dengan standar akan lebih memilih

membeli buah karena lebih mudah dijangkau. Faktor yang kedua yaitu dengan mudahnya bagi pedagang yang telah mendaftarkan diri biasanya mereka menyiapkan dua timbangan yang satu telah diubah dan yang satunya masih normal sesuai yang telah didaftarkan, dan ketika ada pengecekan mereka akan menggunakan timbangan yang normal.

4. Faktor Penegakan Hukum

Menurut Sudjono Sukanto bahwa ada beberapa factor yang mempengaruhi suatu penerapan hukum yang salah satunya adalah faktor penegakan hukum, Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan :

“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”.³⁴

Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang

³⁴ HendiSaryendra, <http://sarmyendrahendy.blogspot.co.id/2012/06/dalamrealita-kehidupan-bermasyarakat.html>, diakses pada 4/02/2016 pukul 18.56.

kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

Hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas penyidikan dan tugas kepolisian lainnya.

Masalah peningkatan kualitas ini merupakan salah satu kendala yang dialami diberbagai instansi, tetapi khusus bagi aparat yang melaksanakan tugas wewenangnya menyangkut hak asasi manusia (dalam hal ini aparat penegak hukum) seharusnya mendapat prioritas.

Walaupun disadari bahwa dalam hal peningkatan mutu berkaitan erat dengan anggaran lainnya yang selama ini bagi Polri selalu kurang dan sangat minim

Melihat pendapat para ahli dimana factor penegakan hukum menjadi sangat penting dikarenakan ini merujuk akibat hukum yaitu minimnya resiko tertangkap oleh pihak terkait untuk suatu tindak pidana. Setelah menganalisis hasil wawancara dan data kuisioner yang didapat dari pihak terkait maka penulis menganalisis salah satu faktor yang terjadinya kejahatan penipuan timbangan yang tidak sesuai standar ini Karena tindak pidana ini masih belum menimbulkan dampak yang besar bagi masyarakat dan tindak pidana ini juga merupakan tindak pidana aduan

dimana masih kurangnya korban yang merasa dirugikan secara luas. Karena sudah adanya badan yang bertugas atau berfungsi untuk melakukan pengecekan secara berkala terhadap penggunaan timbangan oleh pedagang, serta kurangnya kesadaran masyarakat/individu terhadap penipuan dengan menggunakan timbangan yang tidak sesuai standar. Kejadian penipuan dengan timbangan yang tidak sesuai dengan standar ini juga tidak memiliki resiko tertangkap oleh pihak terkait karena kejahatan ini tidak nampak merugikan secara materiil kepada masyarakat karena kejahatan ini lebih kepada kejahatan sosial yang mungkin oleh pihak terkait cukup melakukan sosialisasi ataupun keamanan kepada pedagang yang melakukan kejahatan.

B. Upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam menangani penipuan dengan menggunakan timbangan yang tidak sesuai standar.

Guna meminimalisir terjadinya kejahatan penipuan dengan menggunakan timbangan yang tidak sesuai standar maka dibutuhkan langkah-langkah penanggulangan. Pak Jamal (Staf Bagian Hukum Di UPTD Perindustrian dan Perdagangan Balai Metrologi) menyatakan bahwa adanya dua bentuk penanggulangan yang dapat ditempuh guna meminimalisir kejahatan penipuan dengan menggunakan timbangan yang tidak sesuai dengan standar di Kota Makassar yaitu upaya langsung dan upaya tidak langsung. Selanjutnya penulis akan merangkai lebih lanjut mengenai kedua upaya tersebut sebagai berikut :

1. Upaya Langsung

Upaya langsung adalah upaya yang dilakukan oleh pihak UPTD Balai Metrologi secara langsung terhadap pedagang yang melakukan penjualan buah di pinggir jalan secara khusus dan pedagang buah lainnya secara umum. Adapun upaya-upaya langsung secara lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Pengecekan Secara Berkala dan Secara Langsung oleh Pihak UPTD yang dilakukan secara Langsung.

Pengecekan secara berkala dan secara langsung ini, dimana pihak dari UPTD melakukan inspeksi secara berkala dan mendadak ke lokasi-lokasi penjualan buah baik di pinggir jalan, di pasar-pasar, di ruko, maupun di tempat-tempat yang lain yang menjadi lokasi penjualan buah bagi pedagang yang telah mendapatkan surat teguran dan belum membawa timbangannya ke badan UPTD untuk di cek dan untuk timbangan yang tidak dapat di pindahkan dari tempatnya . Pengecekan yang dilakukan yaitu pengecekan terhadap adanya surat izin penggunaan timbangan yang sah, surat izin perdagangan, dan pengecekan langsung keabsahan dari timbangan, apakah timbangan yang digunakan masih normal seperti pengecekan pertama, ataukah telah diubah.

b. Penyitaan

Penyitaan merupakan tindakan lanjut oleh pihak UPTD, dimana ketika pihak dari pedagang telah mendapatkan surat teguran dan belum melapor ke pihak UPTD maka tindak lanjutnya yaitu diadakannya penarikan atau penyitaan timbangan untuk ditera dan ditera ulang, ataupun diadakan perbaikan terhadap timbangan yang telah diubah oleh pedagang.

c. Reparasi Timbangan Yang telah Diubah

Reparasi timbangan yaitu merupakan proses perbaikan timbangan ataupun pengecekan yang dilakukan pihak UPTD secara langsung, bagi timbangan yang didapat tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak UPTD untuk menentukan berat suatu barang atau timbangan yang baru akan ditera sebelum pemakaiannya.

d. Perubahan Satuan Timbangan yang merupakan Produk Dari Luar Negeri.

Perubahan satuan timbangan yaitu perubahan satuan berat pada timbangan yang merupakan produksi dari luar, karena perbedaan penggunaan satuan di tiap negara, ini untuk memberikan standar

berat yang sama bagi setiap timbangan yang digunakan bagi setiap pedagang di Indonesia.

e. Pemasangan Segel Yang Resmi

Pemasangan segel yang resmi ini diperuntukkan agar adanya tanda legal penggunaan timbangan bagi pedagang, ini juga dapat menjadi landasan bagi konsumen yang akan membeli pada pedagang, karena adanya segel resmi ini menandakan bahwa timbangan yang digunakan resmi telah melalui tahap pengecekan oleh pihak dari UPTD.

2. Upaya Tidak Langsung

Upaya tidak langsung yaitu upaya yang dilakukan oleh pihak pemegang timbangan untuk secara langsung melakukan pengecekan terhadap timbangan yang digunakan di Kantor UPTD, semestinya tindakan ini merupakan tindakan awal yang harus dilakukan oleh pihak dari pemegang barang atau timbangan. Adapun beberapa hal yang menjadi upaya tindak langsung yang harus dilakukan bagi pemilik timbangan yaitu sebagai berikut:

a. Pengecekan Secara Berkala dan Secara Langsung yang dilakukan Di Badan Metrologi Legal

Pengecekan secara berkala, tindakan ini merupakan tindakan wajib yang harus dilakukan oleh pihak dari pemegang timbangan atau

pihak pedagang, yaitu dengan membawa timbangan secara berkala ke kantor UPTD untuk dilakukan pengecekan, penteraan, ataupun penteraan ulang. Ini diperuntukkan bagi timbangan yang bisa dipindahkan tempatkan.

b. Pendaftaran Membuka usaha dengan menggunakan timbangan

Pendaftaran membuka usaha ini dilakukan untuk melakukan pendataan terhadap pedagang yang akan menggunakan timbangan, ini juga merupakan rekomendasi agar mendapatkan surat izin penggunaan timbangan. Pendaftaran ini diperuntukkan untuk mendata agar pihak dari UPTD dapat mudah melakukan pengecekan terhadap pedagang yang telah memenuhi segala perizinan.

c. Pembuatan Surat Izin Penggunaan Timbangan

Surat penggunaan Timbangan ini, diperuntukkan agar pedagang membuat izin secara tertulis kepada pihak badan Metrologi Legal. Dan ini merupakan hal yang terpenting bagi setiap pengguna timbangan Baik yang diperuntukkan untuk perdagangan maupun non perdagangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan tentang faktor-faktor yang melatar belakangi kejahatan penipuan timbangan yang tidak sesuai standar di Kota Makassar dan upaya- upaya dilakukan untuk mengurangi jumlah kejahatan penipuan dengan menggunakan timbangan yang tidak sesuai standar di Kota Makassar, maka penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa terjadinya kejahatan penipuan timbangan yang tidak sesuai standar di Kota Makassar dipengaruhi karena berbagai faktor antara lain faktor ekonomi, lingkungan, mudahnya melakukan kejahatan penipuan, dan faktor penegakan hukum.
2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak kejahatan penipuan timbangan yang tidak sesuai standar terbagi atas dua yaitu upaya langsung dan upaya tidak langsung. Upaya langsung yaitu dengan melakukan Pengecekan Secara Berkala dan Secara Langsung oleh Pihak UPTD yang dilakukan secara Langsung, Penyitaan, Reparasi Timbangan Yang telah Diubah, Perubahan Satuan Timbangan yang merupakan Produk Dari Luar Negeri, Pemasangan Segel Yang Resmi. Upaya tidak langsung yaitu dengan cara Pengecekan Secara Berkala dan Secara

Langsung yang dilakukan Di Badan Metrologi Legal, Pendaftaran Membuka usaha dengan menggunakan timbangan, Pembuatan Surat Izin Penggunaan Timbangan.

B. Saran

1. Lebih ditekankan lagi sosialisasi kepada para pedagang dan masyarakat tentang kejahatan penipuan timbangan yang tidak sesuai standar ini, karena ini akan merugikan konsumen secara pribadi dan untuk pertumbuhan ekonomi. Dan sebaiknya konsumen lebih cerdas memilih lokasi-lokasi untuk membeli buah, karena banyaknya juga pedagang-pedagang gelap yang melakukan penjualan tanpa izin dari dinas perdagangan.
2. Dalam hal ini diupayakan pihak dari UPTD berkerjasama dengan Kepolisian melakukan pengawasan terhadap pedagang untuk menghindari maraknya kejahatan penipuan timbangan yang tidak sesuai standar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, Pustaka Refleksi Books.
- Abdul Syani, 1987, *Sosiologi Kriminologi*, Makassar, Pustaka Refleksi, hlm 137.
- B. Bosu, 1982, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Barda Nawawi Arif, 2010, *Masalah Penegakan Hukum Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 77.
- Baharuddin Lopa dan Moch Yamin, 2001, *Undang-Undang Pemberantasan Tipikor*, Bandung, hl. 16.
- H. Romli Admasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, PT. Eresco.
- J.E Sahetapy, dan Reksodiputro, 1982, *Parados Dalam Kriminologi*, Jakarta, CV. Rajawali.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta.
- Soedjono, 1976, *Penanggulangan Kejahtan*, Bandung, ALUMNI.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-undang:

Undang-undang No.2 Tahun 1981 tentang METROLOGI LEGAL.

WEBSITE :

- <http://ayusaputri46.blogspot.co.id/2013/09/macam-macam-timbangan.htm>, Diakses pada tanggal 11/10/15, pukul 20:35.
- <http://lampung.tribunnews.com/2014/02/24/begini-modus-pedagang-mengurangi-bobot-barang>, Di akses pada tanggal 11/10/2015, Pukul 20:38.
- <http://www.malang-post.com/malang-raya/99800-tera-ulang-ciptakan-pasar-tertib-ukur>, diakses pada tanggal 20/10/15, pukul 23:32.
- HendiSaryendra, <http://sarmyendrahendy.blogspot.co.id/2012/06/dalamrealita-kehidupan-bermasyarakat.html>, diakses pada 4/02/2016 pukul 18.56.